

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Pajak Daerah**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Wulandari & Iryanie (2018:58) Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tanpa imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Pohan (2021:138) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran bagi rakyat.

###### **2.1.1.2. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Masa Pajak Daerah**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Wulandari & Iryanie, 2018:21)

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun buku kalender (Wulandari & Iryanie, 2018:24).

#### **2.1.1.3. Jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten atau kota yang diadministrasikan oleh Dinas atau Pendapatan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak dibagi menjadi dua yaitu:

##### **a. Pajak Provinsi**

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

##### **b. Pajak Kabupaten/Kota**

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### **2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **2.1.2.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 “Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Menurut Anggoro (2018:25) Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor di wilayah hukum daerah tersebut.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu maupun badan usaha di wilayah hukum daerah tersebut.

#### **2.1.2.2. Objek Pajak dan Pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor**

Sebagai salah satu pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak dapat berfungsi apabila tidak memiliki objek yang dapat dikenakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *gross tonnage*). Menurut (Pohan, 2021:138) objek pajak kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai yang dikecualikan yaitu:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah.

#### **2.1.2.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor (Pohan, 2021:230). Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Dalam hal ini wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

#### **2.1.2.4. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Pohan (2021:230) menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

1. Nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu).

Pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi memiliki tarif pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak terutang. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menetapkan tarif pajak dalam maksimum sebagai upaya pencegahan penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban masyarakat, sebagai akibat dari daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak tersebut. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.

- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%, dengan kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
4. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar dihitung dengan cara:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Kepatuhan wajib pajak merupakan pilar utama dalam pemungutan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor yang menjadi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Menurut Pohan (2021:252) apabila saat jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dilakukan, maka wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 25% per tahun dari pokok pajak yang terutang.

#### **2.1.2.5. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota**

Pajak kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan pajak yang dipungut dengan mempertimbangkan dampak dari penggunaan kendaraan bermotor, baik dalam hal kerusakan jalan maupun pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menetapkan bahwa “hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit sebesar 10%, termasuk yang dibagihasilkan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum”.

Menurut Pohan (2021:235) menyatakan bahwa proporsi pajak kendaraan bermotor dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, yaitu dari total penerimaan pemerintah daerah Provinsi sebesar 70%, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 30%.

### **2.1.3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

#### **2.1.3.1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 “Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha”.

Menurut Wulandari et al (2022) bea balik nama kendaraan bermotor adalah proses pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik pertama ke pemilik kedua, dan seterusnya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas pengalihan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi melalui berbagai cara seperti jual beli atau warisan, yang mencerminkan proses perpindahan kepemilikan dari pemilik pertama ke pemilik berikutnya.

#### **2.1.3.2. Objek dan Pengecualian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Menurut Pohan (2021:253) objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor roda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yaitu:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah.



Penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Selain itu, perjanjian sewa menyewa penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kedalam penguasaan kendaraan bermotor. Selain itu, penyerahan kendaraan bermotor ketika pemasukan kendaraan bermotornya dari luar negeri, maka dapat dikenakan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, kecuali:

1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
2. Untuk diperdagangkan;
3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean indonesia;
4. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Sebagaimana pengecualian yang dimaksud tidak berlaku apabila selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

#### **2.1.3.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Subjek pajak dapat diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Menurut Pohan (2021:254) subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan administrasi BBNKB, subjek pajak disebut sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran BBNKB. Wajib pajak BBNKB terbagi menjadi dua yaitu, wajib pajak orang pribadi dapat orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya, dan wajib pajak badan adalah pengurus atau kuasanya (Samudra, 2015:112).

#### **2.1.3.4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Untuk menghitung besarnya pajak terutang diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pada pajak bea balik nama kendaraan bermotor dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan oleh gubernur sebagai kepala daerah dengan berpedoman kepada keputusan Menteri Dalam Negeri (Samudra, 2015:113). Menurut (Anggoro, 2018:130) besarnya tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah, paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) sebesar 20%, dan penyerahan kedua (yang berarti kendaraan bekas) dan seterusnya sebesar 1%.
2. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, maka tarif pajak penyerahan pertama sebesar 0,75%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

Besarnya pajak bea balik nama kendaraan terutang dapat dihitung dengan cara:

$$\text{BBNKB Terutang} = \text{Tarif BBNKB} \times \text{Dasar Pengenaan BBNKB}$$

#### **2.1.3.5. Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota**

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah dalam kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun demikian, penerimaan pajak tersebut tidak sepenuhnya menjadi hak provinsi. Menurut Pohan (2021:235) menyatakan bahwa proporsi pajak bea balik nama kendaraan bermotor

dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, yaitu dari total penerimaan pemerintah daerah Provinsi sebesar 70%, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 30%. Pembagian ini menunjukkan adanya upaya untuk mendorong kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik, khususnya pada sektor transportasi.

#### **2.1.4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

##### **2.1.4.1. Pengertian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 “Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor”.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah alat kebijakan penting untuk mengontrol eksternalitas yang terkait dengan penggunaan mobil, untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak, dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah (Pohan, 2021:258)

Menurut Samudra (2015:125) pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor.

Menurut Anggoro (2018:132) pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak penguasaan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan jenis bahan bakar kendaraan bermotor cair atau gas, berfungsi untuk mengontrol eksternalitas yang terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi ketergantungan impor minyak, dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.

#### **2.1.4.2.Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Objek pajak merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan, karena menjadi acuan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Menurut Pohan (2021:258) Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Cakupan objek pajak yang luas memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan daerah.

#### **2.1.4.3.Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Menurut Samudra (2015:126) subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Artinya bahwa setiap orang yang membeli bahan bakar kendaraan bermotor merupakan subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Wajib pajak pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Artinya subjek pajak hanya dianggap sebagai *end-user*, sehingga pajak yang dipungut tidak dapat dikreditkan dengan pajak lainnya (Samudra, 2015:127).

#### **2.1.4.4.Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (NJBBKB) sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Pohan, 2021:259).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah Pasal 19 ayat (1), tarif untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi ditetapkan sebesar 10%, namun pada setiap daerah memberlakukan tarif pajak 5% (Samudra, 2015:128).

Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Pemberlakuan ketentuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan daerah dalam membedakan pengguna bahan bakar kendaraan umum dengan kendaraan pribadi (Pohan, 2021:260).

Menurut Anggoro (2018:135) menyatakan, Pemerintah pusat dapat mengubah tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden. Kewenangan pemerintah dalam mengubah tarif tersebut dilakukan dalam hal:

1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Apabila harga minyak dunia

telah normal kembali, Peraturan Presiden yang mengubah tarif PBBKB dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

2. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sejak ditetapkannya undang-undang ini.

Menurut Pohan (2021:262) besaran pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Berikut cara perhitungannya:

- a. Jika harga jual bahan bakar kendaraan bermotor tidak termasuk PPN namun sudah termasuk PBBKB (tarif 5%), maka;

$$\text{Nilai Jual} = \frac{100}{105} \times \text{Harga Jual}$$

- b. Jika harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk PPN (tarif 10%) dan PBBKB (tarif 5%), maka;

$$\text{Nilai Jual} = \frac{100}{115} \times \text{Harga Jual}$$

- c. Perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu:

$$\text{PBBKB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP}$$

#### **2.1.4.5. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota**

Menurut Pohan (2021:235) menyatakan bahwa proporsi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, yaitu dari total penerimaan pemerintah daerah Provinsi sebesar 30%, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 70%. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka pemerataan

pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat.

### **2.1.5. Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.1.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Halim & Kusufi (2012:101) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari semua potensi ekonomi daerah yang terdiri dari beberapa sumber utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Siregar & Kusmilawaty (2022) Pendapatan asli daerah adalah suatu penerimaan yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber ekonomi, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pad yang sah, diterima sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta mencerminkan kemampuan daerah dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan.

### 2.1.5.2.Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam mendukung pembangunan dan kemandirian fiskal daerah, yang diperoleh dari berbagai sumber yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Maka, sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu:

#### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum, bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, serta dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Peran dari pajak daerah ini sama seperti pajak pada umumnya, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), dan sebagai alat pengatur (*regulated*) (Wulandari & Iryanie, 2018:24).

#### 2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi”.

Jasa yang dimaksudkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kegunaan lainnya yang dapat dinikmati oleh individu atau organisasi. Menurut



Wulandari & Iryanie (2018:24) retribusi daerah terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus, dan retribusi perizinan tertentu.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini, Keuntungan dari perusahaan daerah termasuk dalam pendapatan daerah, sementara modalnya berasal seluruhnya atau sebagian dari kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Dengan demikian, meskipun perusahaan daerah diharapkan berkontribusi terhadap pendapatan daerah, tujuan utamanya bukan semata mencari keuntungan, melainkan menyediakan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan daerah memiliki peran ganda dalam menjaga keseimbangan, yaitu sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi (Pohan, 2021: 145).

Menurut Wulandari & Iryanie (2018:35) jenis pendapatan tersebut terdiri dari objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal dalam perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal dalam perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal dalam perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dialokasikan untuk mengatur penerimaan daerah yang tidak termasuk kedalam pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Pohan, 2021: 145). Menurut Wulandari & Iryanie (2018:36) yang termasuk kedalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- b. Hasil pemanfaatan atau penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- c. Jasa giro,
- d. Bunga deposito,
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi,
- f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain yang diterima sebagai hasil dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- g. Pendapatan denda akibat keterlambatan pekerjaan,
- h. Pendapatan denda atas pajak dan denda atas retribusi,
- i. Pendapatan hasil eksekusi terhap jaminan,
- j. Pendapatan atas pengembalian,
- k. Fasilitas sosial serta fasilitas umum,
- l. Pendapatan atas penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan,
- m. Pendapatan atas angsuran atau cicilan penjualan.

#### **2.1.6. Teori Federalisme Fiskal**

Teori federalisme fiskal (*fiscal federalism theory*) menjelaskan bagaimana tanggung jawab dan kewenangan keuangan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu sistem desentralisasi, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien karena pemerintah daerah lebih mengetahui preferensi dan kebutuhan masyarakatnya (Oates, 1972:25). Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan belanja publik sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Teori ini menjadi dasar penting karena pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah dan sebagai bentuk dari desentralisasi fiskal.

#### **2.1.7. Teori Kekuasaan Pemaksaan**

Teori kekuasaan pemaksaan (*the theory of compulsory power*) menegaskan bahwa pajak memiliki sifat memaksa karena ditetapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara diwajibkan untuk membayar pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab sosial. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan dikenakan sanksi, baik administratif maupun pidana (Musgrave & Musgrave, 1989:136). Pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), teori ini diimplementasikan melalui kewajiban tahunan pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran pajak yang telah ditentukan. Ketentuan ini disertai dengan pengenaan denda administratif apabila

terjadi keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, sifat memaksa dalam pengenaan PKB menjadikan penerimaan dari sektor ini relatif stabil, dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **2.1.8. Teori Daya Beli**

Teori daya beli (*purchasing power theory*) menjelaskan bahwa kemampuan individu atau masyarakat dalam membayar pajak ditentukan oleh tingkat pendapatan dan daya beli yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan pajak daerah, teori ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan daya beli tinggi cenderung memiliki kemampuan membayar pajak kendaraan atau melakukan pengalihan hak milik kendaraan (BBNKB) (Rosdiana & Irianto, 2012:115). Selain itu, daya beli yang tinggi di suatu daerah mencerminkan potensi fiskal yang besar, sehingga dapat mendorong peningkatan PAD melalui berbagai jenis pajak daerah.

#### **2.1.9. Penelitian Terdahulu**

Sejalan dengan uraian diatas, kajian empiris sebagai bahan acuan dan sumber relevan dalam penulisan usulan penelitian ini maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Adapun pengambilan tinjauan penelitian terdahulu dilakukan untuk membandingkan hasil, objek, dan subjek dari penelitian ini agar dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya, bahan rujukan tersebut antara lain:

Wulandari et al., (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat”.

Hasil penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Aliah et al., (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap PAD Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Akbar et al., (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Implikasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Riyanto & Andiani (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak PKB dan BBNKB Terhadap PAD Jawa Tengah di Masa Pandemi

*Covid-19*”. Hasil penelitian menunjukkan Pemberian Insentif dilakukan satu kali pada tahun 2019 yang menunjukkan pemberian insentif mampu meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB serta dapat melebihi target PAD. Pada tahun 2020 pemberian insentif diberikan sebanyak tiga kali dan menunjukkan bahwa pemberian insentif memberikan peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB, serta dapat melebihi target PAD dimasa Pandemi *Covid-19*.

Mahendra et al., (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh & Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan berdampak positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok tidak berpengaruh signifikan pada PAD.

Suwarsa & Nursifa (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2020-2022”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cianjur periode 2020-2022.

Nurhayati et al., (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap PAD. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak Kendaraan Bermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh terhadap PAD.

Nugrahwati et al., (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Hasil Penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hanifah et al., (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (PPPDW) Kota Sukabumi”. Hasil Penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Setiawan & Isporima (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2019”. Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2019.

Ananda & Idris (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung”. Hasil penelitian yang menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Karolin et al., (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Realisasi Penerimaan dan Identifikasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Kendaraan Bermotor sebagai Variabel Moderasi di Bapenda Provinsi Kalimantan Utara”. Hasil penelitian yang menunjukkan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah Kendaraan Bermotor tidak mampu memoderasi pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA. Jumlah Kendaraan Bermotor mampu memoderasi pengaruh



Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara.

Saputri & Saputra (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung periode tahun 2016-2018”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2016 – 2018. Pajak Kendaraan Bermotor mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebesar 13%.

Rakatitha & Gayatri (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah”. Hasil penelitian yang menunjukkan kontribusi berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah dan nilai rata-rata kontribusinya yaitu sebesar 31,94%. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah dengan nilai rata-rata kontribusi yaitu 39,55%.

Jayanti & Wirananda (2025) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Denda Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Deli Serdang. Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Altrio & Saad (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Laju Pertumbuhan Kontribusi PKB, PBBKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus terhadap pada Jawa barat dan DKI Jakarta Periode Tahun 2015-2019)”. Hasil penelitian menunjukkan laju pertumbuhan PKB, PBBKB, dan BBNKB di Jawa Barat dan DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami naik turun, dengan laju pertumbuhan paling tinggi rata-rata 12,39% di Provinsi DKI Jakarta dengan kriteria laju pertumbuhan yang tidak berhasil. Kontribusi PKB di Provinsi Jawa Barat rata-rata 36,54% setiap tahunnya terhadap pendapatan asli daerah dengan kriteria cukup baik. DKI Jakarta memiliki kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih rendah.

Alkatiri et al., (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Manyanti & Simbolon (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balik Papan tahun 2020-2022”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara simulatan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Iriani et al., (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Pendapatan Asli Darah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan BBNKB di Provinsi Sumatera Utara adalah sangat efektif.

Ahmad et al., (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan PKB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

| No  | Peneliti,<br>Tahun,<br>Tempat<br>Penelitian                         | Persamaan                                                                                                                                                                        | Perbedaan                                                                                                                                                                                                   | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                        | Sumber                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                 | (3)                                                                                                                                                                              | (4)                                                                                                                                                                                                         | (5)                                                                                                                                                                                                                     | (6)                                                                                                                          |
| 1.  | Wulandari et al., (2022) Provinsi Sumatera Barat, Periode 2012-2021 | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> | Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul> Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap</li> </ul> | <i>Journal of Innovation Research and Knowledge (JIRK)</i> , Vol. 2 No.5, Hal 2189-2206, e-ISSN: 2798-3641 p-ISSN: 2798-3471 |

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  | <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Periode Penelitian:</p> <p>2012-2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 2. | <p>Aliah et al., (2019), Provinsi Aceh, Periode 2007-2013</p>    | <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul>                                                 | <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul> <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh</li> </ul> <p>Periode Penelitian:</p> <p>2007-2013</p>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Aceh.</li> </ul>                                                                                                                                                          | <p>Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Vol. 6 No. 1, Hal 33-49, e-ISSN 2549-8355</p>                            |
| 3. | <p>Akbar et al., (2024), Provinsi Lampung, Periode 2018-2022</p> | <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul> | <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Air Permukaan</li> <li>• Pajak Rokok</li> </ul> <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Berganda</li> </ul> <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung</li> </ul> <p>Periode Penelitian:</p> <p>2018-2022</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan</li> </ul> | <p>Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi (JEMSI), Vol. 10 No. 4, Hal 2444-2451, e-ISSN: 2579-5635 p-ISSN: 2460-2451</p> |

|    |                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. |  |
| 4. | Riyanto & Andiani (2021), Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2020          | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendapatan Asli Daerah</li></ul>                            | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif Pajak Kendaraan Bermotor</li><li>• Insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li></ul> Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"><li>• Analisis Model <i>Miles dan Huberman</i></li></ul> Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"><li>• Metode Kualitatif</li></ul> Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"><li>• Provinsi Jawa Timur</li></ul> Periode Penelitian: 2019-2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian Insentif dilakukan satu kali pada tahun 2019 yang menunjukkan pemberian insentif mampu meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB serta dapat melebihi target PAD.</li><li>• Pada tahun 2020 pemberian insentif diberikan sebanyak tiga kali dan menunjukkan bahwa pemberian insentif memberikan peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB, serta dapat melebihi target PAD dimasa Pandemi <i>Covid-19</i>.</li></ul> | Jurnal Manajemen Dirgantara, Vol. 14 No. 2, Hal 12-24, e-ISSN: 2622-0946 p-ISSN: 2252-7451                                                        |  |
| 5. | Comrie Ihza Mahendra, Nelly Masnila, dan Yevi Dwitayanti, 2022, Provinsi | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li><li>• Bea Balik Nama</li></ul> | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pajak Air Permukaan</li><li>• Pajak Rokok</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan berdampak positif dan signifikan terhadap PAD.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Journal Accounting and Finance</i> , Vol. 6 No. 2, Hal 97-106, ISSN 2581-1088                                                                  |  |

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sumatera Selatan                                                 | <p>Kendaraan Bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul>                                    | <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Linear Berganda</li> </ul> <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Cianjur</li> </ul> <p>Periode Penelitian:</p> <p>2012-2021</p>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok tidak berpengaruh signifikan pada PAD.</li> </ul>                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| 6. | Suwarsa & Nursifa (2024), Kabupaten Cianjur Periode 2020-2022    | <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul>                                              | <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Linear Sederhana</li> <li>• Analisis Koefisien Korelasi</li> </ul> <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Cianjur</li> </ul> <p>Periode Penelitian:</p> <p>2020-2022</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cianjur periode 2020-2022.</li> </ul>                                                                                                                                           | <p>Jurnal Akuntansi, Vol.9 No.1, Hal 12-24 ISSN 1979-8334</p>                                      |
| 7. | Nurhayati et al., (2023), Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2020 | <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul> | <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul> <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi DKI Jakarta</li> </ul> <p>Periode Penelitian:</p> <p>2018-2020</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap PAD.</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.</li> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh terhadap PAD</li> </ul> | <p>Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 3, Hal 25970-25981 e-ISSN 2614-3097 p-ISSN 2614-6754</p> |
| 8. | Nugrahwati et al., (2019),                                       | <p>Variabel Penelitian:</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Alat Analisis:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor, Bea</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Jurnal Akuntansi</p>                                                                            |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<br>Periode 2014-2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)</li> <li>• Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul> <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Bangka Belitung</li> </ul> | Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bisnis dan Keuangan<br>STIE-IBEK, Vol.6 No. 2, Hal 41-50, ISSN 2355-9047 |
| Metode Penelitian:                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul>                                                                                                                                      | Periode Penelitian: 2014-2018                                                                                                                                                                                                                 | <div> <div>9.</div> <div> <div>Hanifah et al., (2023), Kota Sukabumi<br/>Periode 2020-2022</div> <div> <div>Variabel Penelitian:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> </div> <div> <div>Variabel Penelitian:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Air Permukaan</li> </ul> <div>Alat Analisis:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul> </div> <div> <div>Tempat Penelitian:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Sukabumi</li> </ul> <div>Periode Penelitian:</div> 2020-2022 </div> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> </ul> </div> <div>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi, Vol. 5 No. 2, Hal 1-13, e-ISSN: 2541-3503 p-ISSN: 2085- 8108</div> </div> |                                                                          |

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Setiawan & Isporima (2021), Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2019   | <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul> | <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul> <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Jawa Barat</li> </ul> <p>Periode Penelitian:</p> <p>2013-2019</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat .</li> </ul> | Jurnal JISIPOL, Vol.5 No. 3, Hal 23-36, p-ISSN 20807-4742                                                 |
| 11. | Ananda & Idris (2023), Provinsi Lampung Periode 2019-2020           | <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul>                                              | <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Sederhana</li> </ul> <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Lampung</li> </ul> <p>Periode Penelitian:</p> <p>2019-2020</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)</i> , Vol. 4 No. 2, Hal 1-9, ISSN 2746-2552           |
| 12. | Karolin et al., (2024), Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2021 | <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> <p>Metode Penelitian:</p>                                                                                                                     | <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor</li> </ul> <p>Variabel Moderasi:</p>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis Kewirausahaan, Vol. 11 No. 2, e-ISSN: 2798-575X p-ISSN: 2354-6581 |



|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Kendaraan Bermotor</li> </ul> <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis <i>Patrial Least Squares</i> (PLS)-<i>Structural Equation Modelling</i> (SEM)</li> </ul> <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Kalimantan Utara</li> </ul> <p>Periode Penelitian: 2017-2021</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara.</li> <li>• Jumlah Kendaraan Bermotor tidak mampu memoderasi pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA.</li> <li>• Jumlah Kendaraan Bermotor mampu memoderasi pengaruh Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara</li> </ul> |                                                                                                       |
| 13. | Saputri & Saputra (2018), Kota Bandar Lampung Periode 2016-2018 | <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> <p>Metode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul> | <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Linear Sederhana</li> </ul> <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Bandar Lampung</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2016–2018.</li> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor mempengaruhi Pendapatan Asli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><i>Accounting Global Journal</i>, Vol. 4 No. 1, Hal 36-58, e-ISSN: 2622-7177 p-ISSN: 2622-1778</p> |

|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Periode Penelitian:<br>2016-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Daerah sebesar<br>13%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Rakatitha & Gayatri (2017), Provinsi Bali Periode 2013-2016          | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapata n Asli Daerah</li> </ul> Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul> | Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul> Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Bali</li> </ul> Periode Penelitian: 2013-2016                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah dan nilai rata-rata kontribusinya yaitu sebesar 31,94%.</li> <li>• Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah dengan nilai rata-rata kontribusi yaitu 39,55%.</li> </ul>                                                                                                                                                            | E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 21 No.2, Hal 1575-1600, ISSN 2302-8556 |
| 15. | Jayanti & Wirananda (2025), Kabupaten Deli Serdang Periode 2019-2022 | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapata n Asli Daerah</li> </ul> Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul> | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda Pajak</li> </ul> Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul> Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupate n Deli Serdang</li> </ul> Periode Penelitian: 2019-2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.</li> <li>• Denda Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.</li> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak, Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama</li> </ul> | Junal EMT KITA, Vol. 9 No. 1, Hal 298-306, e-ISSN: 2579-6204 p-ISSN: 2579-7972      |

|     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
| 16. | Altrio & Saad (2023), Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta Periode 2015-2019 | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul> | Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Deskriptif</li> </ul> Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta</li> </ul> Periode Penelitian: 2015-2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju pertumbuhan PKB, PBBKB, dan BBNKB di Jawa Barat dan DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami naik turun, dengan laju pertumbuhan paling tinggi rata-rata 12,39% di Provinsi DKI Jakarta dengan kriteria laju pertumbuhan yang tidak berhasil.</li> <li>• Kontribusi PKB di Provinsi Jawa Barat rata-rata 36,54% setiap tahunnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan kriteria cukup baik.</li> <li>• DKI Jakarta memiliki kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih rendah.</li> </ul> | <i>Jurnal of Accounting, Management and Islamic Economics</i> , Vol. 01 No. 02, Hal 469-478<br>e-ISSN 3032-4289 |
| 17. | Alkatiri et al., (2020), Kabupaten Bone Bolongo Periode 2015-2019                    | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul>                                                                                              | Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Sederhana</li> </ul> Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Bone Bolongo</li> </ul> Periode Penelitian: 2015-2019                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Jurnal Dimensi Manajemen dan Sektor Publik</i> , Vol. 1 No. 2, Hal 040-049, ISSN 2709-6211                   |
| 18. | Manyanti & Simbolon (2023), Kota                                                     | Variabel Penelitian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Variabel Penelitian:                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Jurnal Pendidikan Tambusai</i> ,                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balikpapan<br>Periode<br>2020-2022                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua</li> </ul> Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul> Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Balikpapan</li> </ul> Periode Penelitian: 2020-2022 | terhadap Pendapatan Asli Daerah. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara simulatan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> | Vol. 7 No. 3, Hal 7440-7445, e-ISSN: 2614-6754 p-ISSN: 2614-3097                                                  |
| 19. Iriani et al., (2021), Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019                                                                                                                                                                                                   | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul> | Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Deskriptif Kuantitatif</li> </ul> Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Sumatera Utara</li> </ul> Periode Penelitian: 2015-2019                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas Penerimaan BBNKB di Provinsi Sumatera Utara adalah sangat efektif.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | Wahana Inovasi, Vol. 10 No. 1, 2021, Hal 172-178, ISSN 2089-8592                                                  |
| 20. Ahmad et al., (2021), Kota Bandung Periode 2016-2020                                                                                                                                                                                                               | Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> Metode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Kuantitatif</li> </ul>          | Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Sederhana</li> </ul> Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Bandung</li> </ul> Periode Penelitian: 2016-2020                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan PKB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020.</li> </ul>                                                                                                                                                                    | RIGEO: <i>Review of International Geographical Education</i> , Vol. 11 No. 5, 2022, Hal 3208-3217, ISSN 2146-0353 |
| <p>Leni Anggraeni Suryani, 2025: Penelitian Penulis</p> <p>Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (Survei pada 34 Provinsi Di Indonesia Periode 2019-2023)</p> |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Penerapan otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menetapkan kebijakan sendiri dalam mengelola daerahnya (Evendia & Satria, 2021:55). Hal ini bertujuan untuk mendorong pembangunan yang lebih efektif serta meningkatkan kemandirian daerah, khususnya dalam aspek keuangan. Kondisi ini selaras dengan teori *federalisme fiskal* yang dikemukakan oleh Oates (1972:25), yang menekankan pentingnya kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke daerah untuk mendorong akuntabilitas fiskal, serta memberikan ruang bagi daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dari sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan melalui pengelolaan dan optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki daerah. Keberhasilan dalam mencapai kemandirian daerah ditandai dengan berkurangnya ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat serta meningkatnya pendapatan asli daerah (Ningsih et al., 2023).

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan yang diperoleh dari wilayahnya sendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintah daerah, oleh karena itu pengelolaan yang optimal serta kebijakan yang tepat sangat diperlukan agar pendapatan tersebut dapat

dimanfaatkan secara efektif dalam mendukung kemandirian dan kemajuan daerah (Halim & Kusufi, 2012:101). Sumber pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah (Wulandari & Iryanie, 2018:24).

Adanya kebijakan penguatan kewenangan perpajakan daerah (*local taxing power*), yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), berarti pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial (Nopyandri, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Provinsi diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah (Anggoro, 2018:25). Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang menjadi kebutuhan dalam mobilitas masyarakat sehari-hari. Saat ini, banyak daerah mendorong warganya untuk mendaftarkan kendaraan dengan nomor polisi daerah setempat yang belum terdaftar sesuai domisili mereka (Kharisma & Junaedi, 2021). Langkah ini bertujuan agar pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan masuk ke kas daerah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kemajuan wilayah tersebut. Pajak ini dikenakan setiap tahun, serta ada denda apabila wajib pajak telat bayar, hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, karena Pajak Kendaraan

Bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah (Pohan, 2021:252). Adanya sifat memaksa tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik (Maritu et al., 2023). Walaupun pembayaran pajak ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, tetapi manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas melalui perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik (Nopyandri, 2015). Dengan demikian, keberadaan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun sesuai aturan yang berlaku mencerminkan prinsip teori ini, sekaligus menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Samudra (2015:54) pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, terutama di daerah dengan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti & Wirananda (2025), bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah yaitu bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu dari jenis pajak daerah. Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penguasaan dan penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari satu pihak ke pihak lain (Pohan, 2021:253). Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, maka intensitas pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor akan bertambah (Rakatitha & Gayatri, 2017). Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya pendapatan pajak daerah dan berpengaruh terhadap pendapatan asli

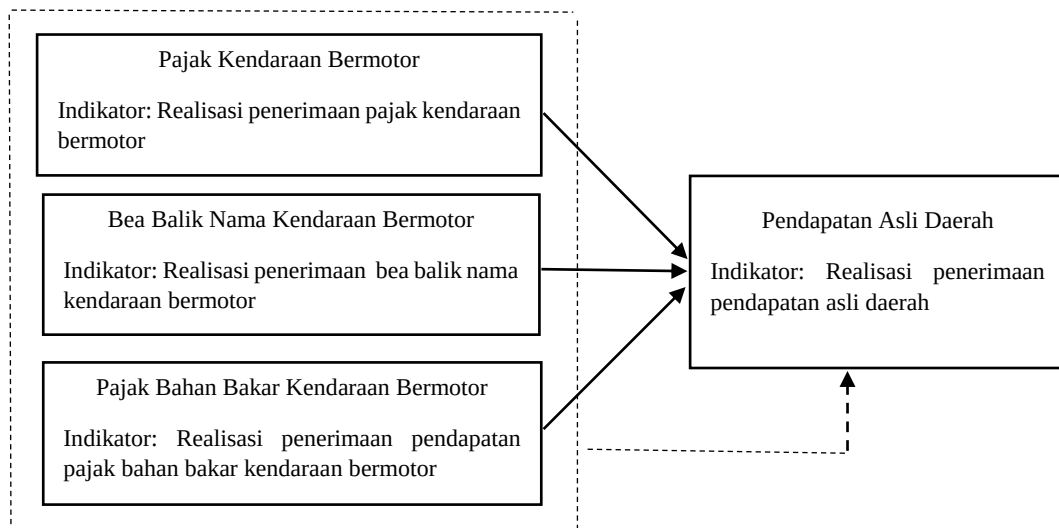
daerah, sebagai akibat dari bertambahnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Ferdiansyah, 2020). Hal ini sejalan dengan teori daya beli yang menyatakan bahwa kemampuan masyarakat dalam membayar pajak mencerminkan kekuatan ekonominya, maka semakin tinggi daya beli masyarakat, akan semakin besar pula potensi penerimaan pajak daerah (Rosdiana & Irianto, 2012:115). Menurut Samudra (2015:108) bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al., (2024) bahwa Bea Balik Nama Kendaraan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Setelah memiliki kendaraan sebagai alat transportasi, tentu diperlukan bahan bakar untuk mengoperasikannya. Kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengenakan pajak pada konsumsi bahan bakar sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah (Pohan, 2021:258). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pungutan yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (Anggoro, 2018:132). Teori daya beli menekankan bahwa kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar mencerminkan aktivitas ekonomi dan dapat menjadi dasar dalam pengenaan pajak (Rosdiana & Irianto, 2012:115). Dengan demikian semakin tinggi daya beli masyarakat terhadap bahan bakar sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas transportasi maka semakin besar pula potensi penerimaan daerah (Nopirin, 2011:112). Menurut Samudra (2015:124) pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena seiring dengan peningkatan



jumlah kendaraan bermotor maka kebutuhan atas bahan bakar kendaraan akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al., (2024) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- ▶ Secara Parsial
- - - - -▶ Secara Simultan

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada 34 Provinsi di Indonesia.
- H<sub>2</sub>: Pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada 34 Provinsi di Indonesia.
- H<sub>3</sub>: Bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada 34 Provinsi di Indonesia.
- H<sub>4</sub>: Pajak bahan bakar kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada 34 Provinsi di Indonesia
- .